



Analisis Kesenjangan Pelaksanaan Standar Proses pada Pembelajaran Produktif di SMK

Atika ¹⁾, I Made Sudana ²⁾, Basyirun ²⁾

¹⁾ Jurusan PKK Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

²⁾ Prodi Pendidikan Kejuruan, Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Januari 2017

Disetujui Maret 2017

Dipublikasikan Juli 2017

Keywords:

pengembangan orientasi karir; nilai-nilai produktif; orientasi kejuruan

Abstrak

Tujuan penelitian, diantaranya menguraikan bagaimana pelaksanaan standar proses, menganalisis seberapa tingkat kesenjangannya dan merancang bagaimana solusi permasalahan terkait kesenjangan pelaksanaan standar proses. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Aspek dalam penelitian ini adalah (a) perencanaan pembelajaran; (b) pelaksanaan pembelajaran; (c) penilaian hasil belajar; (d) pengawasan oleh kepala sekolah. Teknik pengumpulan data, yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam hal perencanaan pembelajaran diperoleh kriteria tidak senjang, artinya pada kegiatan perencanaan tidak banyak guru yang mengabaikan standar yang ditetapkan oleh Permendikbud No. 65 tahun 2013. Hasil analisis pelaksanaan pembelajaran diperoleh kriteria cukup senjang, artinya standar proses yang ditetapkan belum sepenuhnya dilaksanakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada kegiatan penilaian masih diperoleh hasil cukup senjang, artinya masih terdapat ketentuan yang belum diterapkan. Hasil analisis pada komponen pengawasan memberikan kesimpulan jika masih terdapat kepala sekolah yang tidak menjalankan fungsinya sebagai pengawas internal.

Abstract

Therefore, the aims of study are to investigate the implementation of the standard process, analyze the discrepancy rate and design the solution toward the issue of discrepancy. This research uses the quantitative descriptive approach. There are several aspects investigated; (a) lesson plan, (b) learning process, (c) evaluation of learning result, and (d) headmasters' control. To collect the data, the methods of observation, interview, and documentation are used. The result is explained in form of criteria. It is no discrepancy for lesson plans, means that most of the lesson plans are in accord with the Basic Principles issued by Ministry of Education and Culture Number 65 in 2013. The learning process has a quite discrepancy rate, means the standard process is incompletely applied; so does the evaluation which ignores several principles to apply. It is also noted that some headmasters ignore their function as an internal supervisor. To sum up, the discrepancy issue needs further concrete solution.

PENDAHULUAN

Lemahnya proses pendidikan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia. Novera (2004: 478) menuliskan bahwa sekolah menengah di Indonesia mempunyai tipe pembelajaran di kelas yang didominasi oleh guru, hal tersebut memiliki dampak negatif jangka panjang bagi siswa dalam merumuskan pertanyaan dan berpikir kritis. *Problem* lain pada pendidikan Indonesia termasuk kesiapan guru, sumber belajar, infrastruktur dan fasilitas, namun yang terpenting adalah kesiapan guru mengajar dengan lebih banyak melibatkan peserta didik (Rustandi, 2013: 540).

Permasalahan pendidikan tersebut mengakibatkan rendahnya SDM. Pendidikan di Indonesia harus memiliki standar nasional yang memerlukan penyesuaian terhadap dinamika kehidupan yang berkembang dimasyarakat (PP No. 13 tahun 2015). Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu, sehingga nantinya akan dapat diukur kualitas pendidikan nasional.

Pendidikan Kejuruan telah terbukti mempunyai peran besar dalam pembangunan industri di Jerman. Priyowiryanto dalam Dharma, dkk (2013: 9) menyatakan "Jerman menjadi Negara industri yang tangguh karena didukung tenaga terampil lulusan sekolah kejuruan. Sekitar 80% sekolah menengah di Jerman adalah sekolah kejuruan, 20% sisanya adalah sekolah umum". Sejalan dengan hal tersebut Kabupaten Kendal melakukan upaya dengan membuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang seni dan kerajinan salah satunya adalah kompetensi keahlian tata busana untuk mendukung keberlanjutan potensi daerah. Dibutuhkan SMK yang mencapai standar Nasional Pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten.

Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan, dengan lingkup 8 standar, yaitu: (1) standar isi;

(2) standar proses; (3) standar kompetensi lulusan; (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (5) standar sarana dan prasarana; (6) standar pengelolaan; (7) standar pembiayaan; (8) standar penilaian pendidikan.

Standar tersebut saling mempengaruhi dan berhubungan dengan standar lainnya, namun demikian standar proses merupakan jantung dalam sistem pendidikan. Idealnya standar kompetensi lulusan yang baik serta lengkapnya standar isi yang ditetapkan, namun tanpa implementasi ke dalam proses pendidikan, maka semuanya tidak akan berarti apa-apa (Sanjaya, 2014: 10). Standar Proses terdiri dari 4 komponen, yaitu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian hasil belajar dan pengawasan proses pembelajaran.

Observasi yang dilakukan di SMK se-Kabupaten Kendal diperoleh informasi bahwa dalam hal perencanaan, beberapa sekolah membuat RPP hanya untuk memenuhi kewajiban administrasi, bukan sebagai acuan melaksanakan pembelajaran di kelas. Akibatnya pembelajaran relatif tidak terencana. Pelaksanaan pembelajaran produktif tata busana di SMK sering kali masih menerapkan metode *teacher centered*, dimana peserta didik kurang diberikan kebebasan dalam mengembangkan ilmu, kreativitas dan kemampuan mereka dalam mencipta suatu karya. Hal penilaian, berdasarkan pengamatan di beberapa SMK Kabupaten Kendal, penilaian dilakukan dengan menitik beratkan pada penguasaan konsep (kognitif) yang dilakukan melalui tes tertulis, sedangkan konsep sikap dan proses pada saat praktek belum dilakukan 100%. Permasalahan lain yang ditemukan pada saat observasi di beberapa SMK Kabupaten Kendal, menunjukkan fenomena guru mengajar hanya sebagai kegiatan rutinitas tanpa adanya inovasi pengembangan materi maupun strategi dalam mengajar, karena tidak dilakukan supervisi secara berkala. Akibatnya sekolah tidak berkembang karena tidak mengetahui kekurangan yang harus diperbaiki.

Seberapa besarkah kesenjangan pelaksanaan standar proses yang belum sesuai dengan Permendikbud No. 65 tahun 2013,

itulah maka perlu adanya penelitian tentang analisis kesenjangan pelaksanaan standar proses.

METODE

Penelitian ini dilakukan di SMK N 6 Semarang, dan SMK N 3 Klaten. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas XII Tata Kecantikan yang berjumlah 117 siswa dengan sampel 54 siswa diambil secara acak. Sampel yang digunakan adalah *proportionate stratified random sampling*. Alasan menggunakan teknik ini karena yang menjadi populasi dalam penelitian ini hanya siswa kelas XII jurusan Tata Kecantikan yang dibagi ke dalam dua jurusan yaitu jurusan Tata Kecantikan Rambut dan jurusan Tata Kecantikan Kulit. Kedua jurusan tersebut memiliki *stratified* berdasarkan nilai disetiap mata pelajaran. Agar semua kelas dapat terwakili, maka sampel diambil dari masing-masing kelas dengan proporsi sama.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Azwar (2012: 5) mengemukakan pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data *numerical* (angka) yang diolah dengan metode statistika. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu (Azwar, 2012: 7). Sampel yang digunakan untuk penelitian adalah guru produktif tata busana dan Kepala Sekolah di SMK se-Kabupaten Kendal berjumlah 13 sekolah terdiri dari 2 SMK Negeri dan 11 SMK Swasta. Aspek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Analisis Kesenjangan Pelaksanaan Standar Proses pada Pembelajaran Produktif Tata Busana. Faktor yang diteliti meliputi faktor internal terdiri atas pengetahuan dan kesiapan guru dalam merencanakan pembelajaran, pengelolaan kelas oleh guru dalam mengimplementasikan perencanaan, penilaian proses pembelajaran dan faktor eksternal terdiri atas pengawasan oleh kepala sekolah. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan adalah lembar atau

chek list observasi yang digunakan untuk memahami masalah pengumpulan data dalam penelitian dan untuk mengetahui tolak ukur penilaian. Instrumen lain yang digunakan adalah pedoman wawancara. Instrumen divalidasi oleh tiga pakar, yaitu pakar pendidikan secara umum, pakar pendidikan kejuruan dan pakar evaluasi pendidikan. Instrumen yang valid akan diimplementasikan untuk penelitian. Analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesenjangan pelaksanaan standar proses di sekolah menggunakan analisis deskriptif persentase, kemudian diubah ke dalam kalimat yang bersifat kualitatif untuk menentukan kategori sangat senjang, senjang, cukup senjang, tidak senjang dan sangat tidak senjang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis deskriptif pelaksanaan standar proses diperoleh melalui hasil wawancara meliputi 4 komponen, yaitu (1) perencanaan pembelajaran; (2) pelaksanaan pembelajaran; (3) penilaian hasil belajar; (4) pengawasan proses pembelajaran. Hasil penelitian terhadap pelaksanaan standar proses pada mata pelajaran produktif tata busana SMK se-Kabupaten Kendal diuraikan sebagai berikut.

Perencanaan Pembelajaran

Diperoleh total persentase pada komponen perencanaan pembelajaran produktif tata busana di 13 SMK se-Kabupaten Kendal, sebesar 75,2% dengan kriteria **tidak senjang**. Artinya dalam hal perencanaan pembelajaran, guru di sekolah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan pada Permendikbud No.65 tahun 2013. Hasil analisis perencanaan pembelajaran masing-masing indikator dapat pula dilihat pada tabel 1. berikut:

Tabel 1. Ringkasan Hasil Analisis Perencanaan Pembelajaran SMK Se- Kabupaten Kendal

Indikator	Keterlaksanaan (%) Kesenjangan	Kriteria
Adanya Silabus	84,6	Sangat tidak senjang
Adanya RPP	63,5	Cukup senjang
Pemenuhan Kriteria Komponen Silabus	80,9	Tidak senjang
Pemenuhan Kriteria Komponen RPP	74,2	Tidak Senjang
Rata (%)	75,2	Tidak Senjang

Pelaksanaan Pembelajaran

Diperoleh total persentase pada komponen pelaksanaan pembelajaran produktif tata busana di 13 SMK se-Kabupaten Kendal, sebesar 62,58% dengan kriteria cukup senjang. Artinya dalam hal pelaksanaan pembelajaran di sekolah sudah cukup sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan oleh Permendikbud No.65 tahun 2013. Hasil analisis pelaksanaan pembelajaran masing-masing indikator dapat pula dilihat pada tabel 2:

Tabel 2. Ringkasan Hasil Analisis Pelaksanaan Pembelajaran SMK Se- Kabupaten Kendal

Indikator	Keterlaksanaan (%) Kesenjangan	Kriteria
Alokasi Waktu jam Tatap Muka	76,4	Tidak Senjang
Buku Teks yang Digunakan	56,4	Cukup Senjang
Pengelolaan Kelas	65,5	Cukup Senjang
Penggunaan Media	54,6	Cukup Senjang
Penerapan Kegiatan Pendahuluan	64,0	Cukup Senjang
Penerapan Kegiatan Inti	52,0	Cukup Senjang
Penerapan Kegiatan Penutup	66,5	Cukup Senjang
Rata (%)	62,58	Cukup Senjang

Penilaian Hasil Belajar

Diperoleh total persentase pada komponen penilaian hasil belajar mata pelajaran produktif tata busana di 13 SMK se-Kabupaten Kendal, sebesar 57,92% dengan kriteria cukup senjang. Artinya dalam hal penilaian hasil belajar, guru di sekolah belum melaksanakan kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan pada Permendikbud No.65 tahun 2013. Hasil analisis penilaian hasil belajar

masing-masing indikator dapat pula dilihat pada tabel 3:

Tabel 3. Ringkasan Hasil Analisis Penilaian Hasil Belajar SMK Se- Kabupaten Kendal

Indikator	Keterlaksanaan Kesenjangan (%)	Kriteria
Penyusunan Alat Evaluasi	56,5	Cukup Senjang
Penilaian Formatif	54,6	Cukup Senjang
Penilaian Sumatif	62,5	Cukup Senjang
Perencanaan Program Perbaikan	56,4	Cukup Senjang
Pengayaan	55,4	Cukup Senjang
Bimbingan oleh Guru	58,5	Cukup Senjang
Rata (%)	57,92	Cukup Senjang

Pengawasan Proses Pembelajaran

Diperoleh total persentase pada komponen pengawasan proses pembelajaran produktif tata busana di 13 SMK se-Kabupaten Kendal, sebesar 62,2% dengan kriteria cukup senjang. Artinya dalam hal pengawasan proses pembelajaran, kepala sekolah belum sepenuhnya melaksanakan kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan pada Permendikbud No.65 tahun 2013. Hasil analisis penilaian hasil belajar masing-masing indikator dapat pula dilihat pada tabel 4:

Tabel 4. Ringkasan Hasil Analisis Pengawasan Proses Pembelajaran SMK Se-Kabupaten Kendal

Indikator	Keterlaksanaan (%)	Kriteria
Pemantauan Kepala Sekolah	67,2	Cukup Senjang
Supervisi Kepala Sekolah	63,5	Cukup Senjang
Pelaporan Hasil Pemantauan	58,8	Cukup Senjang
Tindak Lanjut Pengawasan	60,0	Cukup Senjang
Rata (%)	62,2	Cukup Senjang

Hasil penelitian Analisis Kesenjangan Pelaksanaan Standar Proses pada Pembelajaran Produktif Tata Busana SMK Se-Kabupaten Kendal, diperoleh keterangan **cukup senjang**. Tingkat kesenjangan masing-masing sekolah sangat berbeda. Perbedaan terjadi pada empat aspek standar proses yang ditetapkan oleh Permendikbud No. 65 tahun 2013 yaitu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan

pembelajaran, penilaian hasil belajar dan pengawasan oleh kepala sekolah.

Perencanaan Pembelajaran

Kesenjangan-kesenjangan dalam hal perencanaan pembelajaran terjadi karena karena tidak adanya pedoman yang menjadi perhatian guru dalam perencanaan pembelajaran, guru sedikit mengabaikan kegiatan perencanaan karena tidak adanya *punishment*, guru lebih fokus pada pembelajaran yang harus dicapai dan diselesaikan dalam satu semester. Kondisi sekolah yang minim peralatan dan gedung menjadi salah satu faktor pendukung tidak berjalannya sistem yang baik. Dampak yang ditimbulkan karena hal tersebut adalah pencapaian peserta didik yang kurang maksimal karena perencanaan dalam pembelajaran tidak terkonsep. Perencanaan menjadi hal yang penting untuk mengetahui bagaimana proses belajar dan tujuan yang akan dicapai. Pernyataan tersebut sejalan dengan Sudaryo dalam Sholeh (2007: 130) yang menegaskan bahwa perencanaan pembelajaran sangat penting yang harus disadari sepenuhnya oleh guru sehingga dapat menciptakan proses pembelajaran yang mencerdaskan. Diperkuat oleh pendapat Astowo (2013: 174) yang mengatakan kejelasan tugas menjadi tanggungjawab guru, kejelasan hasil, kejelasan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dibutuhkan perencanaan yang baik. Permendikbud telah menetapkan standar yang seharusnya diikuti oleh sekolah, salah satunya standar proses yang tertuang dalam Permendikbud No. 65 tahun 2013, dimana disebutkan bahwa penyusunan perencanaan dibutuhkan pedoman sehingga perencanaan proses pembelajaran berfungsi sebagaimana mestinya.

Pelaksanaan Pembelajaran

Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam hal pelaksanaan pembelajaran di 13 sekolah diperoleh kriteria cukup senjang, artinya standar proses yang ditetapkan Permendikbud No. 65 tahun 2013 belum sepenuhnya dilaksanakan. Kesenjangan terjadi karena kurangnya

pengawasan kepala sekolah dalam proses pembelajaran, kurangnya anggaran sekolah sehingga berpengaruh pada jumlah referensi buku, dan kurangnya evaluasi yang dilakukan di sekolah. Pembelajaran adalah sesuatu hal yang sangat dibutuhkan setiap orang, sehingga sekolah seharusnya melakukan pembelajaran yang baik. Veithzal dan Murni (2010: 58) mendefinisikan pembelajaran sebagai proses dimana seseorang memperoleh pengetahuan (*knowledge*), mengembangkan keterampilan (*skills*), dan mengubah sikap (*attitude of change*). Sudjana (2010: 28) mengemukakan bahwa pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu upaya yang sistematis dan sengaja untuk menciptakan agar terjadi kegiatan interaksi *edukatif* antara dua pihak, yaitu antara peserta didik dan pendidik yang melakukan kegiatan membelajarkan. Pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan proses penting yang dilakukan secara sistemik dan sengaja sebagai upaya memperoleh pengetahuan, mengubah sikap dan mengembangkan keterampilan yang terjadi dengan interaksi antara dua pihak, yaitu peserta didik dan pendidik.

Penilaian Hasil Belajar

Hasil analisis menunjukkan bahwa pada kegiatan penilaian masih diperoleh hasil cukup senjang, artinya masih terdapat ketentuan yang belum diterapkan. Hal tersebut terjadi karena beberapa guru masih enggan melakukan analisis untuk menentukan tingkat kesukaran soal, belum melaksanakan penilaian secara otentik, dan guru jarang melakukan analisis faktor kesulitan peserta didik untuk kegiatan remedial. Penilaian hasil belajar dapat menggunakan penilaian otentik seperti yang telah diteapkan pada Permendikbud No. 65 tahun 2013 tentang standar proses. Penilaian otentik merupakan kegiatan menilai peserta didik yang menekankan pada proses maupun hasil dengan berbagai instrumen penilaian (Kunandar, 2014: 35). Penilaian otentik dilakukan bukan hanya pada apa yang dihasilkan oleh peserta didik namun guru perlu menilai *input* (kondisi awal) peserta didik, proses (kinerja dan aktivitas peserta

didik), dan *output* (hasil pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan).

Pengawasan Proses Pembelajaran

Hasil penelitian tersebut memberikan kesimpulan jika masih banyak kepala sekolah yang tidak menjalankan fungsinya sebagai pengawas internal. Terdapat beberapa faktor penyebab diantaranya, *management* yang tidak standar, sekolah yang masih dalam tahap perkembangan, dan kurangnya informasi terkait supervisi. Ahmad Rohani dalam Veithzal (2010: 824) menjelaskan bahwa *supervition is a panned program for the improvment of insruction*, jadi supervisi merupakan program yang terencana untuk memperbaiki pengajaran. Dampak yang ditimbulkan sekolah tidak akan berkembang karena pemimpin sekolah tidak mengetahui kekurangan yang harus diperbaiki.

SIMPULAN

Pelaksanaan standar proses di 13 sekolah belum memenuhi kriteria yang ditetapkan Permendikbud No. 65 tahun 2013, baik dari komponen perencanaan, pelaksanaan, penilaian hingga pengawasan. Kesenjangan terjadi karena tidak adanya pengawasan, kurangnya sarana yang mendukung administrasi guru, minimnya manajemen, tidak diberlakukannya *punishment*, kurangnya anggaran sekolah, kurangnya evaluasi kepala sekolah, beberapa sekolah yang masih dalam tahap pengembangan, dan kurangnya informasi terkait sepervisi. Tingkat kesenjangan mencapai 62,60% dengan kriteria cukup senjang. Aspek perencanaan diperoleh persentase 75,2% dengan kriteria tidak senjang, pada aspek pelaksanaan diperoleh persentase 62,58% dengan kriteria cukup senjang, dalam

hal penilaian diperoleh persentase 57,92% dengan kriteria cukup senjang, dan komponen pengawasan diperoleh persentase. 62,2% dengan kriteria cukup senjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Astowo. 2013. Kinerja Guru dalam Pengelolaan Pembelajaran di SMK. *Portal Garuda*. Volume 1 Nomor 1. Oktober 2013.
- Azwar, Saifuddin. 2013. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dharma, Surya dkk. 2013. *Tantangan Guru SMK abad 21*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Menengah, Dirjen Pendidikan Menengah dan Kemendikbud.
- Kunandar. 2014. *Penilaian autentik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Novera, Amri Isvet. 2004. Indonesian Postgraduate Students Studying in Australia and Examination of their academic, Social and Culture Experiences. *International Education Journal* Vol. 5. No. 4, 2004.
- Peraturan Pemerintah No. 13 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: 2013.
- Peraturan Pemerintah No. 65 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. 2013.
- Rustandi, Andi. 2013. Meaning Negotiation Between Teacher and Students in a Fledgling International Standardized School. *International Journal of English and Education Essay: 2278-4012*, Vol. 2 Issue. 3 July 2013.
- Sanjaya, Wina. 2014. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Sholeh, Muh. 2007. Perencanaan Pembelajaran Mapel Geografi Tingkat SMA dalam Konteks KTSP. *Jurnal Geografi* Volume 4 No. 2 Juli, 2007.
- Sudjana, Nana. 2010. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.